

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN MAJALENGA TAHUN 2025**

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro
Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,37	72,37	1,40%
2.	Angka Kemiskinan	10,82	10,31	-4,71%
3.	Angka Pengangguran	4,01	3,62	-9,73%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,38	6,86	7,52%
5.	Pendapatan per Kapita	34233990	37078620	8,31%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,354	0,371	4,80%

Sumber data : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

1. Urusan Pendidikan

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan
Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,77	95,66
2.	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,53	-
3.	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,44	-
4.	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	52,99	44,19
5.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	95,34
6.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	46,79
7.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	-	43,86

B) Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.048.971.587.506,-** serapan 99,84% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

**Tabel 1.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan
Tahun 2025**

No.	Program	Belanja			Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	582.985.257.250	581.262.738.162	1.722.519.088	99,70
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	559.430.392.467	543.099.988.005	16.330.404.462	97,08
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	349.949.600	340.274.600	9.675.000	97,24
Total		1.142.765.599.317	1.124.703.000.767	18.062.598.550	98,01

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jenjang PAUD, SD dan SMP belum maksimal (100%). Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia yang sekolah yang belum bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (DO).
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
5. Pemenuhan kebutuhan alat tulis dan kelengkapan siswa belum mencapai sasaran dengan sempurna dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

2. Urusan Kesehatan

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,68	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	83,09	99,11
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	82,60	96,04
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	86,89	97,01
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,12	100
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,32	78,06
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86,41	100
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	101,60	100
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100
15.	Persentase kematian ibu	-	0,12
16.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	5,20

B) Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.444.851.977,-** serapan 99,95% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan
Tahun 2025

Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil	38.975.000	38.975.000	100%
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin	113.485.000	113.485.000	100%
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602.510.000	602.482.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	72.280.000	72.280.000	100%
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar	159.360.000	158.970.000	100%

Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	25.000.000	24.999.990	100%
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia	28.860.000	28.660.000	99%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000	24.999.987	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	25.000.000	25.000.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	25.000.000	25.000.000	100%
Pengelolaan pelayanan terhadap terduga TBC	40.000.000	40.000.000	100%
Pengelolaan pelayanan terhadap berisiko tertular HIV	290.000.000	290.000.000	100%
Total	1.445.470.000	1.444.851.977	99,95%

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian berdasar estimasi, jika ke sasaran riil capaian mencapai 100% artinya setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar.
2. Capaian berdasar estimasi, jika ke sasaran riil capaian mencapai 100% artinya setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar.
3. Capaian berdasar estimasi, jika ke sasaran riil capaian mencapai 100% artinya setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

3. Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	71,31	75,99
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	201,09	70,26
3.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100

B) Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman

Realisasi belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 11.682.767.000,-** serapan 98,66% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman
Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.477.443.000	11.125.643.000	96,93
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.477.443.000	11.125.643.000	96,93
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	11.477.443.000	11.125.643.000	96,93
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	300.000.000	297.124.000	99,04
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	297.124.000	99,04
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.417.000	99,42
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	200.000.000	197.707.000	98,85
III	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	260.000.000	260.000.000	100,00

1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	260.000.000	260.000.000	100,00
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	260.000.000	260.000.000	100,00
Total		12.037.443.000	11.682.767.000	98,66

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. IPLT yang belum memenuhi standar teknis operasional menyebabkan proses pengolahan lumpur tinja tidak optimal, sehingga menghambat pelayanan penyedotan lumpur tinja dan berdampak pada efektivitas sistem pengelolaan air limbah domestik.
2. Pembangunan SPAM terkendala pada proses perizinan sumur bor ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat akibat status kepemilikan dan legalitas lahan lokasi sumur bor yang belum jelas atau belum tuntas. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana baru dilakukan pada saat ada pengajuan dan setelah bencana terjadi.
3. Belum adanya identifikasi rumah pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Majalengka menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana belum sepenuhnya berbasis mitigasi risiko.
4. Minimnya Pendekatan Pencegahan dalam Pencapaian SPM, dikarenakan Capaian SPM Perumahan Rakyat masih lebih berorientasi pada penanganan pasca kejadian bencana, belum optimal mengarah pada upaya pencegahan dan mitigasi risiko.

4. Urusan Trantibumlinmas

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan trantibumlinmas yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Capaian Kinerja Outcome Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	-
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	-
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,41	100
5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	60,27
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	19,93	-
8.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	-	33,33
9.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	-	100

B) Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja urusan trantibumlinmas di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 1.972.298.247,-** serapan 81% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.9
Alokasi Anggaran Urusan Trantibumlinmas Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	906.669.800	845.399.787	93%
1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	906.669.800	845.399.787	93%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota	27.299.800	23.649.787	87%
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraandalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	815.500.000	800.000.000	98%
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	63.870.000	21.750.000	34%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	857.416.000	436.974.794	51%
1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH	857.416.000	436.974.794	51%

KABUPATEN/KOTA				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	65.954.900	43.680.095	66%
	Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	670.590.900	329.716.999	49%
	Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	120.870.200	63.577.700	53%
III	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	694.702.000	689.923.666	99%
1	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	694.702.000	689.923.666	99%
	Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kab/kota	694.702.000	689.923.666	99%
	Sub kegiatan Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	-	-	0%
Total		2.458.787.800	1.972.298.247	81%

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS yang sesuai dengan Permendagri No. 121 Tahun 2018, belum tercantum secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUM LINMAS dan Pemadam Kebakaran dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

5. Urusan Sosial

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	-
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	0,90
4	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	15
5	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	18,33
6	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100
7	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	0,12

B) Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 602.682.000,-** serapan 100% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.11
Alokasi Anggaran Urusan Sosial
Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan Dasar	Pagu	Realisasi	Serapan
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah disabilitas yang diberikan alat bantu	139.918.000	139.918.000	100
2.	Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang di pelayanan	-	-	-

3.	Lansia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan bantuan Permakanaan	118.900.000	118.900.000	100
4.	Gepeng	Jumlah Gelandang dan Pengemis yang Mendapatkan bantuan	-	-	--
5.	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan dan oyang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	343.864.000	343.864.000	100
JUMLAH			602.682.000	602.682.000	100

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum, semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar. Sedangkan realitanya data terlantar yang ada memangjumlahnya minim demikian juga penganggarnya, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak.

Idealnya semakin sedikit data terlantar yang ada, maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan wilayahnya. Demikian juga semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua layanan telah dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dengan melakukan sinergi dan koordinasi intensif antar perangkat daerah terkait, serta menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan perlakuan yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan perhitungan pencapaian mutu pelayanan sehingga kinerja bidang social bisa terlihat lewat penanganan yang berhasil 100% dengan berbagai inovasi bahkan bisa lebih efisien dari sisi anggaran.

3. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 Nomor 33A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 Kabupaten Majalengka berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian predikat (WTP) yang berarti 12 kali WTP dari tahun 2013 s.d 2024.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Unaudited Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mencapai sebesar **Rp. 3.169.788.765.295,79** (101,33%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mencapai **Rp. 3.179.987.890.985,00** (96,03%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.12
Ringkasan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4.1.1	Pajak Daerah	261.977.543.684,00	240.828.642.854,00	91,92
4.1.2	Retribusi Daerah	421.111.305.021,00	436.367.785.065,00	103,62
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.634.406.494,00	7.807.541.574,00	90,42
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.061.385.259,00	36.511.963.523,79	151,74
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	715.784.640.458,00	721.539.508.719,79	100,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.251.507.733.000,00	2.298.715.243.003,00	102,09
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	98.729.921.000,00	93.882.899.400,00	95,09
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.239.120.108.000,00	1.294.689.841.198,00	104,48
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.901.516.000,00	47.414.441.116,00	96,95
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	522.078.931.000,00	520.716.073.089,00	99,73
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.908.830.476.000,00	1.956.703.254.803,00	102,50
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			

4.2.1.5.1	Dana Desa	329.095.620.000,00	328.430.351.200,00	99,79
4.2.1.6.1	Insentif Fiskal	13.581.637.000,00	13.581.637.000,00	100,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	342.677.257.000,00	342.011.988.200,00	99,80
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.421.001.624,00	149.534.013.573,00	90,94
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	136.988.801.624,00	122.166.813.573,00	89,18
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	27.432.200.000,00	27.367.200.000,00	99,76
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar	164.421.001.624,00	149.534.013.573,00	90,94
	Jumlah Total Pendapatan Transfer	2.415.928.734.624,00	2.448.249.256.576,00	101,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.131.713.375.082,00	3.169.788.765.295,79	101,21
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.1	Belanja Pegawai	1.411.573.421.611,00	1.363.513.051.027,00	96,59
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	944.861.609.509,00	915.596.137.376,00	96,90
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	55.109.107.535,00	54.973.804.107,00	99,75
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.413.794.138.655,00	2.336.332.992.510,00	96,79
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.890.000.365,00	1.774.137.631,00	93,86
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.369.113.379,00	71.796.227.642,00	94,01
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.373.186.672,00	49.815.459.720,00	95,11
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.339.645.050,00	91.540.065.592,00	98,07
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.916.919.003,00	15.916.919.003,00	100,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	927.855.000,00	911.666.500,00	98,25
	JUMLAH BELANJA MODAL	240.816.719.469,00	231.754.476.088,00	96,23
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.980.679.530,00	104.335.623,00	3,50
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.980.679.530,00	104.335.623,00	3,50
	JUMLAH BELANJA	2.657.591.537.654,00	2.568.191.804.221,00	96,76
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	26.289.968.358,00	15.703.805.900,00	59,73
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	459.872.553.900,00	458.133.090.074,00	99,62
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	486.162.522.258,00	473.836.895.974,00	97,46
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.143.754.059.912,00	3.042.028.700.195,00	96,76
	SURPLUS / (DFISIT)	(12.040.684.830,00)	127.760.065.100,79	(1.061,06)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.915.684.830,00	12.040.684.829,92	71,18
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00

6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAAN	16.915.684.830,00	12.040.684.829,92	71,18
6.2	PENGELUARAN PEMBIYAAAN			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	4.875.000.000,00	5.931.876.744,00	121,67
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIYAAAN	4.875.000.000,00	5.931.876.744,00	121,67
	PEMBIYAAAN NETTO	12.040.684.830,00	6.108.808.085,92	50,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	133.868.873.186,71	100,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2026

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan hasil inventarisasi Inovasi Daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah dan masih berjalan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	E-SAKIP Terintegrasi	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
		SKM Online	Inovasi pelayanan publik
		Si Ompim	Inovasi pelayanan publik
		Ngopi Sae	Inovasi pelayanan publik
		Anugerah Laksana Majapraja	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SMART (Sistem Manajemen Asn Rinci Dan Terintegrasi)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
		MATALENSA (Manajemen Talenta ASN Langkusng Sae)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	NGOPI ORMAS (Ngobrol Penuh Inspirasi ORMAS)	Inovasi pelayanan publik
		Wawasan Kebangsaan Goest To School	Inovasi pelayanan publik
4.	BAPENDA	LAPAK ELIT (Laporan Pajak Elektronik berbasis IT)	Inovasi pelayanan publik
		INTEGRITAS (Sistem Informasi Terpadu untuk Monitoring Pajak Daerah)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
		SIMPEL PBB (Sistem Pengelolaan PBB)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
		PESIR ONLINE (Peta Potensi Pajak Daerah Online)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
		MOBIL LAPAK	Inovasi pelayanan publik
		LAMAN ASIK (LAYanan kepada Masyarakat taNpa Melanggar Protokol Kesehatan)	Inovasi pelayanan publik
		PESONA PATRIOT (Pelayanan Sosialisasi dan Edukasi Pajak Daerah Kepada Pelajar, Mahasiswa, Perhimpunan, Komunitas dan Organisasi)	Inovasi pelayanan publik
		GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Pajak dan Tertib Administrasi)	Inovasi pelayanan publik
		POIN HEBAT (PAJAK ONLINE MUDAHKAN PEMBAYARAN PAJAK KITA)	Inovasi pelayanan publik
		POIN AMBYAR (PAJAK ONLINE GAMPANG BAYAR)	Inovasi pelayanan publik
		D GOLDA (DESA JAGO INOVASI LUNAS & SADAR PAJAK)	Inovasi pelayanan publik
		SIGADIS PAJAK (AKSI DIGITALISASI TRANSAKSI PAJAK)	Inovasi pelayanan publik
		D LUKI (DESA LUNAS PAJAK BERHADIAH)	Inovasi pelayanan publik
		SAPADIA (SOSIALISASI PAJAK MELALUI VIDEO CLIP DAN LAGU)	Inovasi pelayanan publik
		SIPESAT HEBAT (KOLABORASI BAPENDA DAN SAMSAT MUDAHKAN PEMBAYARAN PAJAK KITA)	Inovasi pelayanan publik

		SEMUT PAJAK (PETUGAS PEMUNGUT HEBAT PATRIOT PAJAK)	Inovasi pelayanan publik
		FYP (FOR YOUR PAJAK)	Inovasi pelayanan publik
		MOM AND DAD	Inovasi pelayanan publik
5.	BPBD	SIMANGGA (Sistem Informasi Majalengka Tangguh Bencana)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6.	Dinas Pendidikan	SIPENDIRU (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		PESONA SD (Pekan Sekolah Alam Majalengka Jenjang Sekolah Dasar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		GASPOL (Gerakan Aksi Peningkatan Mutu Sekolah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.	Dinas Sosial	Gerobak Simama (Solusi Inovatif Masyarakat Maju dan Amanah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Rumah Singgah HEGAR	Inovasi pelayanan publik
8.	DISPORA	SIPORA MUDA (Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga menuju Majalengka Unggul Dan Andal)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
9.	DISPARBUD	Harmonisasi Layanan Unggulan Kepariwisata Kabupaten Majalengka (HAYU KA MAJALENGKA)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
10.	DK2UKM	SIDIAPERTAMA (Sistem Digital Pembayaran Retribusi Tenaga Kerja Asing Majalengka)	Inovasi pelayanan publik
		PEJANTAN KEREN (Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Kerjasama Edukasi Dan Rekonsiliasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Kegiatan Strategi Inovasi Jemput Bola terhadap Pelaku UMKM (Lanjut Terus UMKM)	Inovasi pelayanan publik
11.	DISDUKCAPIL	PAS (Pelayanan Adminduk On The Spot)	Inovasi pelayanan publik
		PAPASTEN (Pelayanan Terintegrasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran)	Inovasi pelayanan publik
		PERMATA (PELAYANAN TERINTEGRASI PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN)	Inovasi pelayanan publik
		PAS ADA (Pemberian Administrasi Kependudukan Sebelum Diminta Warga)	Inovasi pelayanan publik
		SAT SET (Persalinan Tenang Sampai dapat Akta)	Inovasi pelayanan publik
		SMART (Optimalisasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak)	Inovasi pelayanan publik
12.	DPMPSTP	MPP (Mall Pelayanan Publik) Pro	Inovasi pelayanan publik
13.	DISKOMINFO	Webinar KenCAN Data (Kenali, Cukupi, dan Analisis Nilai Data)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Visualisasi BeStiE Data (Bewara Statistik dan Edukasi Data)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Visualisasi Basajan (Bewara Siber Majalengka)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Webinar Super Kami (Seputar Siber dan Keamanan Informasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
14.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	OOTW (mOTivasi kOordinasi fasilitasi Wirausaha)	Inovasi pelayanan publik
		PESAT	Inovasi pelayanan publik
15.	Dinas Kesehatan	KRESEK KELOR (KREASI SEHAT KUDAPAN KELOR)	Inovasi pelayanan publik
16.	Satpol PP dan DAMKAR	Pepeling Jumaahan	Inovasi pelayanan publik
17.	BAPPEDALITBANG	SISTEM INFORMASI LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS (SILANDAK)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		Aplikasi Basis Data Inovasi dan Penelitian Pengembangan Daerah (i-Litbang)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		E-MONEV	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
18.	Dinas Lingkungan Hidup	EMAS PKK (Emak Emak Kelola Bank Sampah Bareng PKK)	Inovasi pelayanan publik

		MAJALENGKA TEDUH (Tanam, Edukasi Desa untuk Hijau)	Inovasi pelayanan publik
		HIBER (Hijau Hulu - Bersih Hilir)	Inovasi pelayanan publik
		SIGAP GARDA BIRU (Sistem Informasi GPS Absensi dan Pelaporan Garda Biru)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		SIBER DESA (Sinergi Bersih Desa)	Inovasi pelayanan publik
19.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KALA SENJA (Kanal Layanan Sedot Tinja)	Inovasi Pelayanan Publik
19.	Kecamatan Kadipaten	GERENTES MANAH (Gerakan Revitalisasi Tata Kelola BUMDES Menuju Kadipaten Harmonis)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG STUNTING MELALUI "ONE DAY TRAINING"	Inovasi pelayanan publik
		SISMAKA 2.0 (Sistem Informasi Dan Saran Masyarakat Kadipaten)	Inovasi pelayanan publik
20.	Kecamatan Kasokandel	Sareundeuk Lawan Stunting	Inovasi pelayanan publik
		OPAK KAMI	Inovasi pelayanan publik
21.	Kecamatan Maja	Om Genit (Optimalisasi Gerakan Percepatan NIB Gratis)	Inovasi pelayanan publik
		Lansia Tabah (Lanjut Usia Tangguh dan Bahagia)	Inovasi pelayanan publik
		LAFOR WA KESOS (LAYanan inFORMasi beRBasis Whatsapp Auto KEsejahteraan SOSial)	Inovasi pelayanan publik
		MAJA PEDULI	Inovasi pelayanan publik
		PEPELING (APEL PAGI KELILING)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		CAMAT NGAJAR	Inovasi pelayanan publik
		BEBERES MUSHOLA	Inovasi pelayanan publik
22.	Kecamatan Palasah	PELAMINAN PALASAH (Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasangan Baru Palasah)	Inovasi pelayanan publik
23.	Kecamatan Panyingkiran	PANYAMBAT (PANYINGKIRAN BERSAHABAT)	Inovasi pelayanan publik
		KEBUMI SAE (Kebun Mini Sehat Alami dan Ekonomis)	Inovasi pelayanan publik
		JELITA (Jelajah Lingkungan Bersih Bersama Kita)	Inovasi pelayanan publik
		SAPA DESA (Silaturahmi Apel Pelayanan Desa)	Inovasi pelayanan publik
		SIKOMBET (Solusi Inovatif Komposter Beton)	Inovasi pelayanan publik
24.	Kecamatan Sindangwangi	JESIKA WANGI(JEMPUT SISWA PEREKAMAN KTP-EL PEMULA SINDANGWANGI)	Inovasi pelayanan publik
25.	Kecamatan Sukahaji	JAJAP HAJI (Jajan di Pelaku UMKM Kecamatan Sukahaji)	Inovasi pelayanan publik
26.	Kecamatan Dawuan	IKHLAS (Inovasi Khusus Layanan Lansia dan Disabilitas)	Inovasi pelayanan publik
27.	Kecamatan Jatitujuh	PEDE AJA (Pembina Desa Wujudkan Masyarakat Sejahtera)	Inovasi pelayanan publik
28.	Kecamatan Kertajati	PELABUHAN MESRA KERTAJATI (PELAYanan puBlik terpadU dan HiburAN MELayani Semua masyaRAkat KERTAJATI)	Inovasi pelayanan publik
29.	RSUD Majalengka	ELENA (Electronic Attendance)	Inovasi pelayanan publik
		Fadel (Farmasi Delivery)	Inovasi Pelayanan Publik
30.	RSUD Cideres	ANTOSAN - Antrian Obat Puas Dan Nyaman	Inovasi pelayanan publik
31.	RSUD Talaga	SI SAGA (edukaSI StAtus Gizi Anak)	Inovasi pelayanan publik
		Halo SI-HADE (Sistem Informasi Handling Aduan Efektif)	Inovasi pelayanan publik
		INSTALL (Informasi Seputar RSUD Talaga)	Inovasi pelayanan publik
32.	UPTD Puskesmas Lemahsugih	ANTING EMAS (Atasi Stunting Sedari Dini Bersama Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik
		GEROBAK SEHAT (Gerakan Menanam Tanaman Obat Keluarga Menuju Keluarga Sehat)	Inovasi pelayanan publik
		GEBERIN PIS-PK (GERAKAN BERSAMA INTERVENSI PIS-PK)	Inovasi pelayanan publik
		LEMAHSUGIH SARASA (SATU DESA SATU KLUB OLAH RAGA DAN EDUKASI WARGA)	Inovasi pelayanan publik
33.	UPTD Puskesmas Margajaya	SOBAT HATE (Solusi Berobat Hipertensi/HT)	Inovasi pelayanan publik

34.	UPTD Puskesmas Bantarujeg	SIDAKEP KELUAGA (SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI ASKEP KELUAGA)	Inovasi pelayanan publik
35.	UPTD Puskesmas Malausma	KUDU GETOL (Kecamatan Malausma Peduli Gerakan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan
36.	UPTD Puskesmas Cikijing	MINJAM BERBULAN DAN BERTAMU DI RAMADHAN DI UPTD PUSKESMAS CIKIJING	Inovasi pelayanan publik
		KECAP TB (Kenali Cari Periksa TuBerkulosis)	Inovasi pelayanan publik
37.	UPTD Puskesmas Cingambul	SIBUMIL CETING (Diskusi Bareng Ibu Hamil Mencegah Stunting)	Inovasi pelayanan publik
		SIMETOGA (Sistem Melak Tanaman Obat Keluarga)	Inovasi pelayanan publik
38.	UPTD Puskesmas Talaga	KADUPAK (Kegiatan ANC Terpadu Pada Kunjungan Ibu Hamil K6)	Inovasi pelayanan publik
		SAMBALADO (Senam Sambil Belajar Lalu Terdorong Hidup Sehat)	Inovasi pelayanan publik
39.	UPTD Puskesmas Banjaran	LATO-LATO (Layanan Aktif Dan Totalitas Laskar Toga)	Inovasi pelayanan publik
		SIMBAR KENCANA (Solusi Inovatif Banjaran Tanggap Keluarga Berencana)	Inovasi pelayanan publik
40.	UPTD Puskesmas Argapura	4M TOGA (Mengenal, Menanam, Merawat Dan Mengolah Taman Obat Keluarga)	Inovasi pelayanan publik
		GOSTING MANTAN (GERAKAN ZERO STUNTING MANTAPAN PENCEGAHAN)	Inovasi pelayanan publik
41.	UPTD Puskesmas Maja	HANARAGA (Penyuluhan dan Aksi Ramuan TOGA) UPTD PUSKESMAS MAJA	Inovasi pelayanan publik
		ELING DA PENTING (EDUKASI PEDULI STUNTING DAN PELAYANAN ANAK STUNTING)	Inovasi pelayanan publik
42.	UPTD Puskesmas Majalengka	GELORA BERSINAR (GERAK OLAHRAGA BERSAMA DETEKSI DINI PENYAKIT TIDAK MENULAR)	Inovasi pelayanan publik
		SEDALAM HATI (SEHAT DARI DALAM HIDUPKAN ASUHAN MANDIRI TERINTEGRASI)	Inovasi pelayanan publik
43.	UPTD Puskesmas Cigasong	GULA CAKAR HITS (Gerakan dan Usaha Lanjutan Cari Kasus Hipertensi)	Inovasi pelayanan publik
44.	UPTD Puskesmas Sukahaji	GEBOY TETI (Gerakan Edukasi Bagi Orang Yang Tensi Tinggi)	Inovasi pelayanan publik
		GRANAT MAS (GERAKAN NANYA BATUK MASYARAKAT)	Inovasi pelayanan publik
		GEBER SEKARDARA (Gerakan Bersama Skrining Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim)	Inovasi pelayanan publik
		EKSPRESI (Edukasi Kesehatan Bersama PROMKES Sukahaji)	Inovasi pelayanan publik
45.	UPTD Puskesmas Sindang	CERAMAH PAGI (Cek Tekanan Darah Petugas Yang Datangi)	Inovasi pelayanan publik
		Mirasa Chinta (Minum Ramuan Stevia Cegah Hipertensi dan Diabet Melitus Dengan Tuntas)	Inovasi pelayanan publik
		EMPING MELINJO (Eliminasi dan Pencegahan Stunting Melalui Pelayanan 1000 HPK Terjadwal dan Terorganisir)	Inovasi pelayanan publik
		GEMPITA ((Gerakan Pemantauan PMT Lokal Ibu Hamil KEK dan Balita)	Inovasi pelayanan publik
		TITIP RINDU PUSKESMAS SINDANG (Tempat Informasi Terintegrasi Arsip Elektronik Di UPTD Puskesmas Sindang)	Inovasi pelayanan publik
		KOPI ADEM (Kumpulan Orang Pintar Atasi Diabetes Melitus)	Inovasi pelayanan publik
		BAJA RINGAN (Basmi Jentik Di Ruangan dan Lingkungan)	Inovasi pelayanan publik
		PENSIL WARNA (Penyuluhan dan Sosialisasi Kehamilan Bagi Wanita Usia Subur Dengan Satu Anak)	Inovasi pelayanan publik
46.	UPTD Puskesmas Rajagaluh	Kampung Peduli Jiwa (KAPUJI)	Inovasi pelayanan publik
47.	UPTD Puskesmas Sindangwangi	AMANAT LURAH (MANFAATKAN TANAMAN OBAT DI HALAMAN RUMAH)	Inovasi pelayanan publik
		BERCHINTA (BERSAMA CEGAH HIPERTENSI DI SEKITAR KITA)	Inovasi pelayanan publik
		KADER SEHATI (Kader Sehat Tanggap HIV)	Inovasi pelayanan publik

		SI GENTING CERIA (Sistem Gerak Terpadu Intervensi Stunting-Cegah, Edukasi, Responsif, Integratif, dan Aktif))	Inovasi pelayanan publik
		SEHATI SEWANGI (Sehat Aktif Produktif Seluruh Warga Sindangwangi)	Inovasi pelayanan publik
		SEMAR INDERA (Screening Mandiri dan Responsif Indera Pendengaran dan Penglihatan)	Inovasi pelayanan publik
48.	UPTD Puskesmas Leuwimunding	GEMPITA TENSI (Gerakan Merubah Perilaku penderita HiperTENSI)	Inovasi pelayanan publik
49.	UPTD Puskesmas Waringin	QUICK WIN	Inovasi pelayanan publik
50.	UPTD Puskesmas Jatiwangi	KRESEK KELOR (KREASI SEHAT KUDAPAN KELOR)	Inovasi pelayanan publik
51.	UPTD Puskesmas Loji	GEMILANG BERSERI (GERakan MInum teh bunga teLANG BERSama SEhat setiap haRI)	Inovasi pelayanan publik
52.	UPTD Puskesmas Balida	PANTO GARASI (Peningkatan pengetahuAN Tanaman Obat keluarGA dengan caRA edukaSI)	Inovasi pelayanan publik
53.	UPTD Puskesmas Kasokandel	BIT REMATRI CERIA (BIT Remaja Putri Cegah Anemia)	Inovasi pelayanan publik
		RICEK (RUTIN CEK KESEHATAN)	Inovasi pelayanan publik
		BEMO MASLAHAT (Berhenti Merokok Masyarakat dan Lingkungan Sehat)	Inovasi pelayanan publik
54.	UPTD Puskesmas Panyingkiran	Si JELITA TB (Aksi Jemput Layani Penderita TB PARU)	Inovasi pelayanan publik
		SERU MEMBARA (Sehat Rutin Memanfaatkan Taman Obat Keluarga)	Inovasi pelayanan publik
55.	UPTD Puskesmas Kertajati	GEROBAK PELITA SI DIA (Gerakan Obat Keluarga Peduli Penderita Hipertensi Dan Diabetes Melitus)	Inovasi pelayanan publik
		SI KABID CETING (KolaboraSI KAdar dan BIDan Cegah StunTING)	Inovasi pelayanan publik
		SIMASKOT (Deteksi Dini Kesehatan Masyarakat Secara Terpadu dan Komprehensif)	Inovasi pelayanan publik
56.	UPTD Puskesmas Sukamulya	Bubur Sum- sum Kuah Jahe Merah Makanan Tradisional Kaya Antioksidan dan Penghangat Tubuh	Inovasi pelayanan publik
57.	UPTD Puskesmas Jatitujuh	SICEPAT KILAT (Sistem Colaborasi Edukasi Penanggulangan Aids Terpadu Berbasis Kinerja Lapangan Tepat Sasaran)	Inovasi pelayanan publik
		KOPI HITAM (Kelompok Peduli Hipertensi dalam Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik
		BERLIAN SETUMPUK (Bersinergi Lintas Program & Lintas Sektor Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas)	Inovasi pelayanan publik
		LAJUR PESAT (Kolaborasi Wujudkan Remaja Peduli HIV AIDS Secara Sistematis)	Inovasi pelayanan publik
		KAPUJA MELATI (Karyawan Puskesmas Jatitujuh Melak Toga Hiji)	Inovasi pelayanan publik
		SEHATKAN (Sedekah Jumat Untuk Kebaikan) Puskesmas Jatitujuh	Inovasi pelayanan publik
		SI MASE (Diskusi Masyarakat Sehat)	Inovasi pelayanan publik
		CINTA SEJATI (Cari Informasi Kesehatan Setiap Senin & Jumat Pagi)	Inovasi pelayanan publik
		58.	UPTD Puskesmas Panongan
Kapus Cemas ti Peuting (Kaheman Puskesmas Cegah Masyarakat Tina Peunyakit jeung stunting)	Inovasi pelayanan publik		
59.	UPTD Puskesmas Ligung	SIAGA LIGUNG (Singkatan dari: Sehat Ikatan Aktif Gerak BAreng Ligung Giat Untuk Negeri)	Inovasi pelayanan publik
60.	Labkesda	PAMER (Pemeriksaan Air Minum dan air bERSih)	Inovasi pelayanan publik
61.	DISARPUSDA	SIMPONI (Sistem Perpustakaan Online Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik
		LONTAR (Layanan Online Arsip Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik
		SRIKANDI DIGI-DESA Arsip Masuk Desa	Inovasi layanan tata kelola kearsipan Perangkat Daerah
		GERAK LITERASI (Gerakan Rakyat Berkarya dengan Literasi)	Inovasi pelayanan publik

		SAE (Search Archives Entitas) untuk pencarian arsip oleh masyarakat dengan entitas tertentu yang dihimpun oleh Lembaga Kearsipan Daerah secara digitalisasi	Inovasi pelayanan publik
62.	Kecamatan Ligung	Sicantik Kembang Desa (Sinergi Cipta Kerjasama Perusahaan dan Koperasi Membangun Desa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
63.	Kecamatan Leuwimunding	SAMAWA (Sambangi Rumah Warga)	Inovasi pelayanan publik
		Layanan Sae (layanan Langsung Perubahan Status Pendidikan di Kartu Keluarga)	Inovasi pelayanan publik
		Simpatik Paman Bansos (Aksi Penempelan Stiker Bagi Penerima Manfaat Bantuan Sosial)	Inovasi pelayanan publik
64.	Kecamatan Cikijing	GERBANG KEMAH DI KANAGA (Gerakan Membangun Kesadaran Memilah Sampah Kering dan Bersih di Kantor, Sekolah dan Rumah Tangga)	Inovasi pelayanan publik
		PASONI (Pasukan Sampah Organik)	Inovasi pelayanan publik
		CELAH LABIRIN (Celengan Sampah Plastik Bersih dan Kering)	Inovasi pelayanan publik
		PATROLI (Pamong Desa Ngontrol Lingkungan)	Inovasi pelayanan publik
		KAMILAH (Kader Pemilah Sampah)	Inovasi pelayanan publik
		SICIKI (Sistem Informasi Cikijing)	Inovasi pelayanan publik
		GAJEBO SI KK (Gerakan Jemput Bola Ktp dan KK)	Inovasi pelayanan publik
65.	UPTD Puskesmas Kadipaten	JEMPUT SEHAT (jelajah masyarakat peduli ukur tekanan darah, sehat)	inovasi pelayanan publik
		SINI JUMPA BURESTI (deteksi dini dengan kunjungan rumah dan pemantauan ibu hamil resiko tinggi)	inovasi pelayanan publik
		KEJAR IMPIAN SUGANDA (kegiatan mengejar imunisasi bayi dan anak dengan suntikan ganda)	inovasi pelayanan publik
65	DP3AKB	SAREBU (Sakola Bareng Ibu-Ibu)	inovasi pelayanan publik
66	DPKPP	e-Master (elektronik-Manajemen Sistem Informasi dan Pelaporan Terintegrasi)	Inovasi Pelayanan Publik
67	BPBD	SIGAP MJL (Sistem Informasi Geospasial Adaptif Penanggulangan Bencana) Majalengka	Tata kelola pemerintahan daerah
		SAPA 24 (Sahabat Pelayanan Publik 24 Jam Berbasis AI)	Inovasi Pelayanan Publik
68	Dinas PUTR	Unit Reaksi Cepat (URC) Tambal Lubang Jalan	Inovasi Pelayanan Publik

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 2026

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada website www.majalengkakab.go.id.

Majalengka, 30 Maret 2026

BUPATI MAJALENGKA



H. EMAN SUHERMAN